

## **Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara**

**Christine S.T. Kansil<sup>1</sup> Adifa Jauza Ulataqiy<sup>2</sup>**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [adifa.205230157@stu.untar.ac.id](mailto:adifa.205230157@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Peran negara dalam penegakan hukum kesehatan di Indonesia merupakan aspek krusial yang sejalan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menggarisbawahi hak atas kesehatan. Negara diharapkan untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi dan memenuhi hak kesehatan masyarakat, melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Penegakan hukum kesehatan mencakup tindakan terhadap pelanggaran, termasuk sanksi bagi penyedia layanan yang tidak mematuhi standar. Dalam konteks ini, negara juga perlu merespons situasi darurat kesehatan, seperti pandemi, dengan langkah-langkah yang cepat dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kesehatan merupakan hal yang penting. Dalam jangka panjang, komitmen politik dan alokasi sumber daya yang memadai diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan. Melalui pendekatan holistik dan berbasis hak asasi manusia, negara dapat menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum kesehatan, Hak atas kesehatan, Negara, Kebijakan kesehatan

### **Abstract**

*The role of the state in enforcing health law in Indonesia is a crucial aspect aligned with constitutional provisions, particularly Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, which emphasizes the right to health. The state is expected to create a legal system that protects and fulfills the health rights of the community through the formulation of policies, regulations, and oversight of health service delivery. The implementation of Law No. 36 of 2009 on Health underscores the government's responsibility to provide accessible and quality health services. Health law enforcement includes actions against violations, including sanctions for providers that do not comply with standards. In this context, the state must also respond to health emergencies, such as pandemics, with swift and effective measures. Additionally, public participation in health decision-making processes is vital. In the long term, political commitment and adequate resource allocation are necessary to ensure the sustainability of health programs. Through a holistic, human rights-based approach, the state can create an inclusive and quality health system for all members of society.*

**Keywords:** Health Law Enforcement, Right to Health, State, Health Policy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Hukum kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, peran negara sangat krusial, terutama dalam penegakan hukum kesehatan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak-hak kesehatan setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap

orang berhak atas kesehatan. Oleh karena itu, penegakan hukum kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan negara dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dalam perspektif hukum tata negara, penegakan hukum kesehatan tidak hanya terkait dengan kebijakan kesehatan yang diterapkan, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara diharapkan dapat menciptakan regulasi yang efektif dan adil, serta melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten dan transparan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan telah diundangkan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjadi landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.<sup>1</sup>

Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Selain itu, masalah akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau juga menjadi persoalan yang perlu diatasi oleh negara. Dalam hal ini, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan hak atas kesehatan secara adil. Pentingnya peran negara dalam penegakan hukum kesehatan juga terlihat pada situasi darurat, seperti pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dalam penanganan kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga hak-hak warga negara. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus haruslah diimbangi dengan upaya memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi negara dalam menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam kerangka hukum tata negara, penegakan hukum kesehatan juga berkaitan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang peran negara dalam penegakan hukum kesehatan di Indonesia, terutama dari perspektif hukum tata negara. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam menjamin hak atas kesehatan dan menangani tantangan-tantangan yang ada. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kebijakan dan praktik hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas beberapa aspek penting terkait peran negara dalam penegakan hukum kesehatan.

Pertama, akan dianalisis bagaimana negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kesehatan, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga, kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum kesehatan, sehingga negara dapat lebih responsif dan

---

<sup>1</sup> Rusyidi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023) "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63

bertanggung jawab terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum kesehatan di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum kesehatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam kebijakan kesehatan. Pada akhirnya, melalui penegakan hukum kesehatan yang baik dan berkeadilan, negara diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.<sup>2</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tulisan ini akan membahas tentang Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan Di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. Karena itu terdapat 2 pertanyaan, yaitu;

1. Bagaimana Peran Negara dalam Penegakan Hukum Kesehatan Sesuai dengan Ketentuan Konstitusi?
2. Implikasi Hukum Tata Negara terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan metode library research. Dimana metode ini data yang diperlukan diperoleh dengan cara analisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Objek penelitian ini adalah aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier yang merujuk kepada sumber-sumber yang diberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Kesehatan Sesuai Dengan Ketentuan Konstitusi**

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, peran negara sebagai pengatur dan pelindung hak atas kesehatan merupakan aspek yang sangat penting. Negara diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang mendukung pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera, yang meliputi kebutuhan dasar untuk hidup, termasuk kesehatan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Penegakan hukum kesehatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan kesehatan yang efektif, regulasi terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan, hingga tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor kesehatan. Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur berbagai hal terkait penyelenggaraan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan kesehatan. Dengan kata lain, negara harus berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

<sup>2</sup> Jeddawi, M. (2020). "Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan". Jurnal Pallangga Praja (JPP), 2(1), 1-15

yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu peran utama negara dalam penegakan hukum kesehatan adalah melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berbasis pada hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap kebijakan kesehatan yang diambil harus mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Negara harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan, sehingga semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografi, dapat menikmati hak kesehatan mereka. Dalam hal ini, negara perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan kesehatan yang ada, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Regulasi dan pengawasan juga merupakan bagian penting dari peran negara dalam penegakan hukum kesehatan. Melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait, negara harus mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Negara juga harus menetapkan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan kesehatan. Di samping itu, negara berkewajiban untuk mengawasi penerapan standar tersebut agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kualitas yang diharapkan. Dalam konteks ini, pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dan malpraktik dalam pelayanan kesehatan, serta melindungi masyarakat dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Selain regulasi dan pengawasan, penegakan hukum kesehatan juga melibatkan tindakan hukum terhadap individu atau institusi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Negara memiliki hak untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum kesehatan, baik berupa tindakan administratif, denda, maupun pidana. Sebagai contoh, jika terdapat penyedia layanan kesehatan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, negara dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional atau denda. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong penyedia layanan kesehatan untuk menjalankan praktik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya peran negara dalam penegakan hukum kesehatan juga dapat dilihat dalam konteks respons terhadap situasi darurat kesehatan, seperti pandemi. Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah cepat dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengaturan akses terhadap vaksin, pengawasan terhadap penyebaran penyakit, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Sebagai contoh, selama pandemi COVID- 19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan akses masyarakat terhadap vaksin dan layanan kesehatan, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Ini menunjukkan bahwa negara harus siap untuk beradaptasi dan responsif terhadap tantangan kesehatan yang muncul.<sup>4</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus mengintegrasikan pendekatan lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan. Misalnya, penanggulangan masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi buruk tidak hanya memerlukan intervensi di sektor kesehatan, tetapi juga di bidang pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, peran negara sebagai pengatur dan pelindung kesehatan masyarakat harus bersifat holistik, mencakup semua aspek yang dapat memengaruhi kesehatan individu dan komunitas.

<sup>3</sup> Ardin, A. T., Adiningsih, C.N., Sofyan, D.R., & Irawan, F. (2022). "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela". *Jurnal of Law, Administration and Social Science*, 2(1), 33-34

<sup>4</sup> Sari, N.P.P., & Maghfira, S. (2021). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 11-21

Tanggung jawab negara dalam penegakan hukum kesehatan juga diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang diakui oleh Indonesia. Misalnya, melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum domestik tetapi juga oleh norma-norma internasional. Hal ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan akses terhadap layanan kesehatan, memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan kesehatan.

Secara keseluruhan, peran negara dalam penegakan hukum kesehatan sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan tanggung jawab yang kompleks dan multidimensional. Negara harus mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan kesehatan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, penegakan hukum kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

### **Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat**

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Di Indonesia, hak kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk kesehatan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Implikasi hukum tata negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pembentukan kebijakan, pengaturan dan penyelenggaraan layanan kesehatan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kesehatan. Salah satu implikasi utama hukum tata negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat adalah perlunya negara untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan kesehatan yang adil dan merata. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kelompok rentan. Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, negara diharuskan untuk menyelenggarakan sistem kesehatan yang baik dan terjangkau, serta melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya.<sup>5</sup>

Selain itu, hukum tata negara juga mengharuskan adanya pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan. Negara perlu menetapkan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan kesehatan, baik publik maupun swasta. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan standar tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang

<sup>5</sup> Akhmaddhian, S. (2016) "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1)

berkualitas. Pengawasan yang ketat juga penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti malpraktik atau penyalahgunaan wewenang oleh tenaga kesehatan. Melalui regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, negara dapat memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat terpenuhi dan dilindungi. Dalam konteks penegakan hukum, negara juga harus siap untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau institusi yang melanggar hak kesehatan masyarakat. Misalnya, jika terdapat penyedia layanan kesehatan yang melakukan malpraktik atau gagal memberikan pelayanan yang memadai, negara harus mampu memberikan sanksi yang sesuai, baik berupa denda, pencabutan izin, atau sanksi pidana. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera dan mendorong penyedia layanan kesehatan untuk mematuhi regulasi yang ada, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat terpenuhi.

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam bidang kesehatan, agar mereka dapat menuntut haknya jika terdapat pelanggaran. Implikasi hukum tata negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat juga mencakup perlunya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan, terutama kelompok-kelompok yang paling terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, negara dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, di mana partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, hukum tata negara juga berperan dalam menjamin keberlanjutan program-program kesehatan. Negara harus memastikan bahwa program-program kesehatan yang telah disusun tidak hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu, tetapi juga dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, anggaran kesehatan yang memadai harus dialokasikan dalam APBN maupun APBD. Negara perlu memiliki komitmen politik yang kuat untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk sektor kesehatan, sehingga semua program kesehatan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan masyarakat akan terjaga dalam jangka panjang.<sup>6</sup>

Dalam konteks global, negara Indonesia juga terikat oleh berbagai komitmen internasional yang mengatur hak kesehatan. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang mengakui hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak kesehatan masyarakat sesuai dengan standar internasional. Hal ini menuntut negara untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses bagi semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, hukum tata negara juga berkaitan dengan upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang bersifat struktural. Negara perlu menyusun kebijakan yang mengatasi determinan sosial kesehatan, seperti kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, negara dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat. Misalnya, peningkatan akses terhadap pendidikan yang baik dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara

<sup>6</sup> Arliman, L. (2020) "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Hukum Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532

keseluruhan. Dalam hal ini, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek yang memengaruhi kesehatan masyarakat diperhatikan.<sup>7</sup>

Implikasi hukum tata negara juga terlihat dalam konteks krisis kesehatan, seperti pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia. Dalam situasi seperti ini, negara harus mampu merespons dengan cepat dan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan-kebijakan darurat yang diambil harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak individu selama masa krisis. Negara juga harus memastikan bahwa informasi yang akurat dan transparan disampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri. Respons yang baik dari negara dalam situasi darurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Dalam kesimpulannya, implikasi hukum tata negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks dan multidimensional. Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan yang adil, mengatur dan mengawasi layanan kesehatan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak kesehatan. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat, negara dapat memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat terpenuhi dan dilindungi. Selain itu, komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program-program kesehatan. Melalui upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, negara dapat menciptakan sistem kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

Peran negara dalam penegakan hukum kesehatan sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan masyarakat terjamin dan terlindungi. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, termasuk dalam hal kesehatan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Implikasi hukum tata negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat sangat luas dan mencakup pembentukan kebijakan, pengaturan penyelenggaraan layanan kesehatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kesehatan. Negara harus merumuskan kebijakan kesehatan yang adil dan merata, memastikan bahwa semua kelompok, termasuk yang paling rentan, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan sistem kesehatan yang baik dan berkelanjutan. Lebih jauh, negara juga diharapkan untuk menetapkan standar pelayanan kesehatan yang jelas dan melaksanakan pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan. Dengan pengawasan yang ketat, praktik-praktik merugikan seperti malpraktik dapat dicegah, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kesehatan, baik melalui sanksi administratif maupun pidana,

<sup>7</sup> Thamrin, A. (2019) "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dibidang Kesehatan". Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(1), Hlm. 33-51

<sup>8</sup> Triwulan, T., & Sh, M.H. (2016). "Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia". Prenada Media.

menjadi penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan kesehatan juga merupakan aspek penting dalam hukum tata negara. Negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, keberlanjutan program-program kesehatan memerlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai, agar semua program dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks global, Indonesia terikat oleh berbagai komitmen internasional yang mengatur hak kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum domestik, tetapi juga harus memperhatikan norma-norma internasional. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam penyelenggaraan kesehatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akhirnya, respons negara terhadap situasi darurat kesehatan, seperti pandemi, menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan darurat harus tetap mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin transparansi informasi kepada masyarakat. Melalui tindakan yang efektif dan berlandaskan pada hak asasi manusia, negara tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Dengan demikian, penegakan hukum kesehatan menjadi tanggung jawab kompleks yang mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Negara harus bersifat holistik dalam pendekatannya, dengan memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua warga negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Jeddawi, M. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(1), 1-15.
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63.
- Sari, N. P. P., & Maghfira, S. (2021). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Peran Pemerintah dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 11-21.
- Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.
- Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.